



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARIMIN
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 211736

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.503.240.000

1. Tanah Seluas 926 m2 di JEPARA, WARISAN Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 989 m2 di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 582 m2 di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 898 m2 di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. Tanah Seluas 416 m2 di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 58.240.000
6. Tanah Seluas 1394 m2 di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/42 m2 di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 90.000.000

1. MOBIL, NISSAN MARCH 12 (4X2) M/T Tahun 2014, WARISAN Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA ACB2J21B02 A/T / VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA NC12ASF2CBI A/T / VARIO Tahun 2013, WARISAN Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 8.388.055



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.601.628.055
III. HUTANG	Rp.	40.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.560.828.055

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.